

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Sulawesi Utara secara tahunan pada triwulan III 2021 berdasarkan kota pencatatannya relatif lebih rendah dari periode sebelumnya. Inflasi kota Manado tercatat sebesar 2,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 2,41% (yoy). Penurunan tekanan inflasi tidak lepas dari faktor kenaikan pasokan di tengah penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat akibat pemberlakuan PPKM sepanjang triwulan III 2021. Fenomena yang berbeda terjadi di Kotamobagu. Secara tahunan, inflasi Kotamobagu sebesar 2,30% (yoy) tercatat lebih besar dibandingkan periode sebelumnya yang juga mencatatkan inflasi sebesar 2,00% (yoy). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau kembali menjadi penggerak utama inflasi di Kota Kotamobagu selain kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Di sisi lain, kenaikan kelompok Pendidikan yang lebih rendah dibanding kenaikan tahun ajaran baru pada dua tahun sebelumnya dan turunnya tekanan inflasi kelompok Transportasi menahan laju inflasi secara tahunan periode laporan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan harga komoditas perikanan yang terutama terjadi pada awal triwulan disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem di Sulut terutama pada minggu kedua dan ketiga bulan Juli 2021. Berdasarkan peringatan dini dari Badan Meteorologi dan Geofisika pada tanggal 16-22 Juli 2021 terdapat Siklon tropis IN-FA yang berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem. Di samping komoditas perikanan, minyak goreng dan tomat di kedua kota pencatatan inflasi juga menunjukkan tren peningkatan harga secara tahunan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Setelah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Utara, HLM TPID Kota Manado, HLM TPID Kota Kotamobagu, dan HLM TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Triwulan I dan Triwulan II 2021, TPID terus melakukan koordinasi untuk memastikan tindak lanjut komitmen HLM telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Sementara dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat terkait dengan stabilitas harga, komunikasi massa terus dilakukan melalui saluran siaran pers dan update harga pangan di pasar secara harian melalui media sosial Dinas Perdagangan kabupaten/kota di Sulawesi Utara untuk memberikan kemudahan akses informasi harga bagi masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Sulawesi Utara akan kembali merumuskan roadmap pengendalian inflasi pada tahun 2022 mendatang. Evaluasi menyeluruh dari program kerja yang telah dicanangkan sepanjang 2019-2021 perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Melalui evaluasi dan penyusunan roadmap kedepan, diharapkan tingkat inflasi di Sulawesi Utara dapat lebih stabil dan terkendali demi kesejahteraan masyarakat

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Peningkatan aktivitas diperlukan untuk menjaga permintaan dan mendorong pemulihan ekonomi daerah meski berisiko meningkatkan tekanan inflasi. Oleh sebab itu, beberapa upaya pengendalian inflasi terus dilakukan melalui koordinasi intensif pusat dan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 (Rakornas). Rakornas yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2021 tersebut telah diikuti oleh seluruh TPID di Sulawesi Utara secara daring. Adapun salah satu arahan Presiden

RI dalam kegiatan tersebut adalah agar TPIN dan TPID melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Menindaklanjuti arahan tersebut, berbagai koordinasi telah dilakukan dengan salah satunya berfokus pada identifikasi Local Value Chain komoditas potensial di Sulut. TPID Sulut telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 dan 20 September 2021, dengan harapan TPID juga mampu mendorong sektor produktif di samping menjaga inflasi tetap terkendali.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sinergi antar daerah yang telah diawali dengan kerja sama Sulut, Gorontalo, dan Maluku pada tahun 2020 akan terus dipantau dan diimplementasikan lebih luas lagi. Penjajakan demi penjajakan dilakukan pada beberapa pelaku usaha di ketiga provinsi tersebut sebelum dapat menemukan model bisnis yang tepat untuk dikerjasamakan. Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan KAD akan kembali menjadi perhatian yang tertuang dalam flagship program dalam roadmap pengendalian inflasi Sulut tahun 2022-2024. Mengingat adanya keterbatasan di masa pandemi termasuk realokasi anggaran untuk TPID, capacity building dalam rangka meningkatkan kompetensi perangkat daerah dalam upaya pengendalian inflasi sampai dengan triwulan III 2021 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali pada awal tahun. Hal ini juga menjadi perhatian TPID baik provinsi ataupun kabupaten/kota, sehingga pada tahun 2022 telah direncanakan beberapa kegiatan capacity building dan studi banding untuk meningkatkan kualitas TPID